



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH KE DESA PADA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf f Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa, alokasi kurang bayar dan lebih bayar Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Ke Desa pada Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	f
KABAG HUKUM	f
KASUBBAG	f

Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 nomor 34);

16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KE DESA PADA TAHUN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	f.
KABAG HUKUM	g
KASUBBAG	x

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah 10% dari realisasi Pajak Daerah yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dibagikan kepada seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi.
7. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah 10% dari realisasi Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dibagikan kepada seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Maksud dari di bentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar alokasi kurang bayar dan lebih bayar Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa.

Pasal 3

Tujuan dari di bentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan transfer ke Desa.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 4

Penetapan kurang bayar dan lebih bayar Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa pada tahun 2018:

- a. kurang Bayar Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
- b. kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017.
- c. kurang Bayar Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

- (1) Kurang Bayar Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a sebesar Rp11.587.997.800,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b sebesar Rp1.242.783.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Kurang Bayar Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c sebesar Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Rincian Kurang Bayar sebagaimana dimaksud Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 27 November 2018

AS III
BUPATI NATUNA, SIK

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 27 November 2018

AS III
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 63

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN KURANG
BAYAR DAN LEBIH BAYAR ALOKASI
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KE DESA PADA TAHUN 2018

RINCIAN KURANG BAYAR ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KE DESA
TAHUN 2018

NO	NAMA DESA	Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Total
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	SEBELAT	146,295,600	19,890,700	105,000	166,291,300
2	AIR PUTIH	136,836,000	4,954,000	105,000	141,895,000
3	MEKAR JAYA	206,015,200	4,954,000	105,000	211,074,200
4	BINJAI	181,267,000	9,637,500	105,000	191,009,500
5	PIAN TENGAH	200,412,600	4,954,000	105,000	205,471,600
6	SELAUT	151,779,000	4,954,000	105,000	156,838,000
7	KAMPUNG HILIR	145,284,000	5,249,100	105,000	150,638,100
8	BATU BERIAN	183,809,400	10,464,000	105,000	194,378,400
9	TANJUNG SETELUNG	145,907,200	5,363,200	105,000	151,375,400
10	TANJUNG BALAU	151,524,400	10,049,300	105,000	161,678,700
11	PANGKALAN	141,791,600	4,954,000	105,000	146,850,600
12	JERMALIK	144,570,600	4,954,000	105,000	149,629,600
13	SUNGAI ULU	216,461,400	49,697,900	105,000	266,264,300
14	SEPEMPANG	198,769,400	60,965,900	105,000	259,840,300
15	BATU GAJAH	211,703,200	11,989,400	105,000	223,797,600
16	KELARIK UTARA	179,817,600	31,198,700	105,000	211,121,300
17	KELARIK	185,457,400	31,621,700	105,000	217,184,100
18	KELARIK BARAT	145,724,400	15,652,300	105,000	161,481,700
19	KELARIK AIR MALI	168,007,600	22,727,800	105,000	190,840,400
20	TELUK BUTON	146,884,600	17,322,500	105,000	164,312,100
21	BELAKANG GUNUNG	145,293,800	9,404,300	105,000	154,803,100
22	SELUAN BARAT	139,109,400	11,373,900	105,000	150,588,300
23	GUNUNG DURIAN	148,500,600	5,006,400	105,000	153,612,000
24	SUBI	146,369,400	5,873,200	105,000	152,347,600
25	SUBI BESAR	156,000,800	5,174,200	105,000	161,280,000
26	MELIAH	131,577,400	25,050,700	105,000	156,733,100
27	PULAU PANJANG	146,512,000	5,443,800	105,000	152,060,800
28	TERAYAK	156,086,200	4,954,000	105,000	161,145,200
29	PULAU KERDAU	141,548,800	4,954,000	105,000	146,607,800
30	SUBI BESAR TIMUR	157,648,800	4,954,000	105,000	162,707,800
31	MELIAH SELATAN	133,322,800	18,650,900	105,000	152,078,700
32	TANJUNG PALA	171,717,600	32,944,100	105,000	204,766,700
33	AIR PAYANG	151,065,000	6,468,300	105,000	157,638,300
34	KADUR	140,644,200	25,954,000	105,000	166,703,200
35	SABANG MAWANG	176,340,800	103,926,600	105,000	280,372,400
36	SEDEDAP	157,396,800	5,425,800	105,000	162,927,600

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN	6.
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	8

1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
37	TANJUNG BATANG	191,949,400	5,579,800	105,000	197,634,200
38	SERANTAS	210,739,200	5,121,500	105,000	215,965,700
39	SABANG MAWANG BARAT	163,235,800	5,425,800	105,000	168,766,600
40	TELUK LABUH	149,482,800	4,954,000	105,000	154,541,800
41	TANJUNG	145,295,000	37,079,600	105,000	182,479,600
42	CERUK	175,164,000	6,749,200	105,000	182,018,200
43	KELANGA	168,370,600	11,194,900	105,000	179,670,500
44	PENGADAH	170,417,400	13,640,400	105,000	184,162,800
45	SEBADAI HULU	147,568,800	11,863,700	105,000	159,537,500
46	LIMAU MANIS	151,701,800	17,449,800	105,000	169,256,600
47	SELEMAM	158,844,000	13,246,300	105,000	172,195,300
48	TAPAU	182,224,200	67,022,000	105,000	249,351,200
49	HARAPAN JAYA	209,239,800	108,189,300	105,000	317,534,100
50	AIR LENGIT	205,396,600	73,304,500	105,000	278,806,100
51	CEMAGA	203,840,800	18,263,500	105,000	222,209,300
52	CEMAGA SELATAN	169,086,400	4,954,000	105,000	174,145,400
53	CEMAGA UTARA	155,625,800	4,954,000	105,000	160,684,800
54	CEMAGA TENGAH	143,451,600	4,954,000	105,000	148,510,600
55	ARUNG AYAM	187,437,800	15,681,900	105,000	203,224,700
56	AIR NUSA	171,335,600	12,891,100	105,000	184,331,700
57	AIR RINGAU	143,498,000	20,317,800	105,000	163,920,800
58	PAYAK	173,986,000	15,173,500	105,000	189,264,500
59	BATUBI JAYA	261,012,000	34,073,600	105,000	295,190,600
60	GUNUNG PUTRI	201,954,000	34,726,500	105,000	236,785,500
61	SEDARAT BARU	186,826,800	11,260,100	105,000	198,191,900
62	SEDANAU TIMUR	155,974,400	9,201,700	105,000	165,281,100
63	SEMEDANG	152,489,400	4,954,000	105,000	157,548,400
64	PULAU TIGA	147,863,200	8,752,200	105,000	156,720,400
65	TANJUNG KUMBIK UTARA	160,236,400	7,091,600	105,000	167,433,000
66	SETUMUK	164,072,600	4,954,000	105,000	169,131,600
67	SELADING	163,014,600	4,954,000	105,000	168,073,600
68	AIR KUMPAI	144,290,000	4,954,000	105,000	149,349,000
69	BATU BELANAK	140,831,400	6,690,400	105,000	147,626,800
70	GUNUNG JAMBAT	144,089,000	26,048,100	105,000	170,242,100
JUMLAH		11,587,997,800	1,242,783,000	7,350,000	12,838,130,800

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>f</i>
KABAG HUKUM	<i>f</i>
KASUBBAG	<i>R</i>

f BURATI NATUNA *slh*
R ABDUL HAMID RIZAL